BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset Negara dijalankan melalui 3 bidang utama, yaitu:
 - a. Bidang Pidana Umum, yang berperan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang merugikan aset negara serta memastikan eksekusi putusan pengadilan terkait.
 - b. Bidang Pidana Khusus, yang menangani kasus-kasus berat seperti korupsi dan pencucian uang, dengan tujuan memulihkan aset negara yang hilang melalui kerja sama dengan berbagai instansi, baik nasional maupun internasional.
 - c. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan, yang bertanggung jawab atas pencatatan, penyimpanan, serta pengelolaan aset yang telah disita atau dirampas, memastikan bahwa barang bukti dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan negara.
2. Kendala-Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Padang Dalam Penyelamatan Aset Negara yaitu :
 - a. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.
 - b. Minimnya kerja sama Antara instansi yang berwenang.

- c. Keterbatasan anggaran dalam penyelamatan aset negara
 - d. Prosedur dan Regulasi yang rumit dalam penyelamatan aset Negara
3. Upaya-Upaya Kejaksaan Negeri Padang dalam penyelamatan aset negara
- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Koordinasi yang erat antara Kejaksaan dengan berbagai lembaga negara.
 - c. Memprioritaskan pengelolaan aset yang memiliki nilai ekonomis tinggi
 - d. Penerapan prosedur yang efisien dan cepat dalam penyelamayaan aset negara

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, adapun saran-saran yang dapat diberikan terhadap hasil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM Kejaksaan Negeri Padang sebaiknya terus mengembangkan dan memperkuat pelatihan untuk para jaksa, dengan fokus pada keterampilan khusus seperti akuntansi, manajemen aset, dan analisis keuangan. Program pelatihan ini akan mendukung peningkatan kemampuan jaksa dalam menangani kasus aset negara yang kompleks dan meningkatkan efektivitas pemulihan aset.
2. Penguatan Kerja Sama Antarlembaga Meskipun Kejaksaan Negeri Padang telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, koordinasi yang lebih intensif antara Kejaksaan, BPK, LMAN, KPK, Kementerian Keuangan, serta instansi lokal perlu diperkuat. Hal ini penting agar setiap

lembaga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal, sehingga pemulihan aset negara dapat lebih efisien dan efektif.

3. Optimalisasi Penggunaan Teknologi Kejaksaan perlu mengembangkan sistem digital yang lebih canggih dalam hal administrasi dan pengelolaan aset yang disita. Penggunaan teknologi informasi yang lebih luas, termasuk platform untuk transparansi lelang dan pengelolaan barang bukti, dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan dalam pemulihan aset negara.
4. Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur, Prosedur dan regulasi yang rumit dalam penyelamatan aset negara perlu disederhanakan untuk mempercepat proses penyelamatan. Oleh karena itu, penting bagi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi yang ada dan menggali peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih fleksibel namun tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.